

## Solusi Persoalan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu

Arrafiqur Rahman, Irwan Effendi, Lufita Nur Alfiah, Purwantoro

### Abstrak

Grafik angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu dalam sepuluh tahun terakhir hampir tidak pernah menunjukkan penurunan yang signifikan. Tahun 2019 jumlah penduduk miskin Rokan Hulu nomor satu terbanyak di Provinsi Riau dengan angka sebesar 72,28 ribu jiwa. Artikel ini membahas tentang berbagai solusi terkait dengan masalah kemiskinan di Rokan Hulu, secara spesifik artikel ini adalah merupakan hasil dari Diskusi Publik yang dilakukan oleh Universitas Pasir Pengaraian tentang persoalan kemiskinan di Rokan Hulu.

Data primer dalam artikel ini diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) melalui kegiatan diskusi public, dengan informen sebanyak 18 orang dari berbagai kalangan, meliputi tokoh masyarakat, akademisi, birokrat, unsur pemerintah daerah, lembaga legislative, lembaga adat melayu, organisasi masyarakat, pemuda dan profesi, dan lain-lain. Selain itu pandangan sikap beberapa komentator di berbagai media setelah kegiatan diskusi dilakukan juga dijadikan sebagai data primer dalam tulisan ini. Selanjutnya sikap dan pandangan informen di analisis dengan pendekatan *thematic analysis* menggunakan sofwer NVivo 12 Plus.

Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa secara umum solusi penanggulangan kemiskina di Rokan Hulu terdiri dari tiga poin mindmap, yaitu: 1). Solusi terkait data, 2). Solusi terkait program cepat, dan 3). Solusi kebijakan untuk jangka panjang. Berdasarkan kesimpulan tersebut pemerintah daerah Rokan Hulu pada dasarnya telah mendapatkan rambu-rambu solusi yang akan dilakukan, selanjutnya diperlukan perumusan langkah teknis yang konkrit dan komprehensif terkait dengan rencana pelaksanaan dari setiap solusi yang ditawarkan.

### Kata Kunci: Kemiskinan, Rokan Hulu

#### PENDAHULUAN

Grafik angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu dalam sepuluh tahun terakhir hampir tidak pernah menunjukkan penurunan yang signifikan. Data BPS menunjukkan gambar grafik sebagai berikut.



Gambar 1. Grafik perkembangan persentase penduduk miskin Rokan Hulu 2010- 2018

Sumber: Prasetyo, 2019

Pada tahun 2019 Kabupaten Rokan Hulu pada dasarnya telah berhasil menurunkan persentase angka kemiskinan sehingga menjadi 10,95%. Namun demikian grafik jumlah penduduk miskin ternyata Rokan Hulu menempati pada urutan yang pertama di Provinsi Riau sebagai jumlah penduduk miskin terbanyak, tercatat di angka sebesar 72,28 ribu jiwa. Grafik jumlah penduduk miskin

menurut data BPS Kabupaten Rokan Hulu 2019 adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Grafik perkembangan jumlah penduduk miskin Rokan Hulu 2010- 2018  
Sumber: Prasetyo, 2019

Kemiskinan merupakan isu global di setiap negara berkembang maupun sedang berkembang. Negara sedang berkembang di sebagian wilayah di Asia dan Afrika, berurusan dengan agenda pengentasan kemiskinan. Sementara bagi negara maju, sangat tertarik membahas kemiskinan, karena kondisi dinegara berkembang berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik mereka. Kesimpulannya kemiskinan menjadi urusan semua bangsa dan menjadi musuh utama umat manusia didunia (Haryati, 2011).

Kemiskinan merupakan persoalan sosial dan juga ekonomi. Masalah kemiskinan merupakan prioritas utama suatu Negara dan merupakan *key performance indicator* keberhasilan program pemerintah (Rahman dkk, 2014), di Rokan Hulu masalah ini tentunya harus menjadi perhatian utama dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, berbagai upaya tentunya harus dilakukan agar persoalan jumlah angka kemiskinan ini dapat dikurangi. Artikel ini membahas tentang berbagai solusi terkait dengan masalah kemiskinan di Rokan Hulu, secara spesifik artikel ini adalah merupakan hasil dari Diskusi Publik yang dilakukan oleh

Universitas Pasir Pengaraian tentang persoalan kemiskinan di Rokan Hulu yang menghadirkan berbagai panelis baik dari unsur tokoh masyarakat, akademisi, birokrat, unsur pemerintah daerah, lembaga legislative, lembaga adat melayu, organisasi masyarakat, pemuda dan profesi, serta unsur-unsur lainnya.

## TINJAUAN LITERATUR

Oleh karena persoalan kemiskinan merupakan isu global, maka pemaknaan atas kemiskinan telah mengundang banyak ragam, baik itu dalam tataran pemikiran dunia internasional maupun secara nasional. Akan tetapi keragaman pemaknaan tersebut jika diperhatikan dengan seksama lebih kepada ukuran atau penterjemahan atas dimensi-dimensi dari kemiskinan itu sendiri, sedangkan konsep umum tentang makna kemiskinan pada dasarnya tetap mengarah pada filosofi dan hakikat yang sama.

Seperti halnya tulisan Suradi (2009;8) yang menjelaskan pandangan Griffin dalam memaknai kemiskinan di negara Asian Selatan dan Asia Tenggara pada umumnya dipandang sebagai keadaan dengan adanya kelaparan, kekurangan gizi, ditambah pakaian dan perumahan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah, tidak ada atau sedikit sekali kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang elementer, dan lain-lain. Sejalan juga seperti tulisan Hermawati (2011;10) mengutip pemikiran Booth dan Mc Cawley yang mengemukakan bahwa suatu keadaan dikatakan miskin apabila ditandai oleh kekurangan atau ketidakmampuan memenuhi tingkat kebutuhan manusia. Kemiskinan tersebut meliputi kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan Sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-

sumber keuangan, dan informal seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah.

Departemen Sosial RI (2004) mendefinisikan kemiskinan itu adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan orangnya dapat dikatakan sebagai fakir miskin, mereka adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (Prasetyo, 2019).

Secara spesifik untuk melihat karakteristik penduduk miskin itu, tulisan Susantyo & Nainggolan (2018) menjelaskan pandangan Suharto et al. (2004) menguraikan bahwa kemiskinan memiliki berbagai dimensi, yaitu: (1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan); (2) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan

transportasi); (3) Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga); (4) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massa; (5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam; (6) Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat; (7) Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan; (8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental; serta (9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumahtangga, janda miskin. kelompok marjinal dan terpendil)

Mengacu pula pada tulisan (Suradi, 2009) yang menguraikan 14 indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik melalui Direktorat Fakir Miskin (2007) yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.

8. Hanya mengkonsumsi daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli 1 (stu) stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak 1 (satu)/2 (dua) kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan dengan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Selanjutnya, terkait dengan upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, mengacu pada Departemen Sosial RI (2004:27) ada enam program pokok penanggulangan kemiskinan yang dilakukan, yaitu : 1). program pengembangan usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBE), 2). program pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM)-KUBE fakir miskin, 3). program rehabilitasi sosial daerah kumuh, 4). program santunan hidup dan jaminan kesejahteraan sosial keluarga miskin, 5). program pengembangan kemitraan sosial dalam penanggulangan kemiskinan, dan 6). program terpadu

penanganan desa miskin (pengembangan adopsi desa miskin).

Sementara itu, mengacu pada tulisan Susantyo & Nainggolan (2018) salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diterapkan Pemerintah Indonesia saat ini adalah melalui Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfers-CCT) yang diadopsi oleh banyak Negara dalam dekade terakhir (Fiszbein & Schady, 2009). Program ini bertujuan memberikan bantuan untuk membiayai kebutuhannya, namun penerimaannya mensyaratkan perilaku tertentu, seperti kehadiran sekolah secara rutin/teratur atau memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar. Di Indonesia program ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan system perlindungan sosial dan strategi intervensi pengentasan kemiskinan di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2007.

#### *Kemiskinan dalam perspektif Islam*

Kabupaten Rokan Hulu berjulukan sebagai negeri seribu suluk. Julukan ini secara implisit menunjukkan bahwa ciri khas karakter penduduk Rokan Hulu adalah orang-orang yang agamis, dan berwawasan pandangan yang Islami, untuk itu solusi pengentasan kemiskinan berkaitan dengan pandangan Islam tentunya juga perlu dihadirkan dalam artikel ini. Terkait dengan hal ini penulis hanya menguraikan pandangan dari tokoh Islam Kontemporer terkenal yaitu Yusuf Al Qardhawi dalam bukunya Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, tahun 2005. Berdasarkan pandangan Yusuf Al-Qardhawi disebutkan bahwa kemiskinan di dalam Islam juga merupakan persoalan

sosial yang harus di berantas dengan sebaik-baiknya. Islam memandang bahwa Allah SWT telah telah mengangkat harkat dan martabat manusia dan juga meninggikan posisinya, sebagaimana firmanNya dalam Surat Al-Isra ayat 70:

*Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.*

Allah juga telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan menciptakan baginya seluruh makhluk yang kesemuanya itu bertujuan untuk membantu tugas dan kepentingannya serta merealisasikan misinya. Sebagaimana firman Nya dalam Surah Luqman Ayat 20:

*Tidakkah kamu memperhatikan, Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk mu apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin.*

Apabila semua itu telah menunjukkan atas kemuliaan dan kedudukan manusia dalam Islam maka tidak berlebihan apabila kemudian syariat Allah dibuat untuk memenuhi segala kebutuhan manusia dan menjaga seluruh kepentingan yang berhubungan dengannya serta mewujudkan segala tuntunan biologisnya.

Islam memandang Kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi, dimana seorang muslim harus segera memohon perlindungan kepada Allah. Terlebih jika kemiskinan ini makin meraja

maka ia akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaannya. Ia bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu meraja maka ia akan menjadi kekayaan yang mampu membuat seseorang zalim baik kepada Allah maupun kepada manusia lainnya. Banyak sahabat Rasulullah menyatakan bahwa Rasulullah sendiri pernah memohon perlindungan Allah dari kemiskinan, sebagaimana hadis yang menyebutkan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata: *Ya Allah Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kekayaan dan juga berlindung padamu atas fitnah kemiskinan (Hadits Riwayat Bukhari)*

Tampak dari hadits ini sesungguhnya Rasulullah berlindung kepada Allah dari semua hal yang melemahkan baik secara materi ataupun secara maknawi baik kelemahan itu karena tidak mempunyai uang atau kemiskinan atau tidak mempunyai harga diri dan juga karena hawa nafsu atau kehinaan.

Islam juga menginginkan agar setiap manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya di mana dengan hal itu ia bisa menikmati kehidupannya yang dipenuhi dengan keberkahan langit dan bumi serta mampu mendayagunakan segala apa yang ada didalamnya dengan sebaik mungkin hingga akhirnya manusia akan merasakan kebahagiaan di berbagai aspek kehidupan dan juga keamanan serta rasa syukur terhadap semua nikmat yang diterimanya, dengan demikian manusia pun akan mampu beribadah kepada Allah dengan khusuk, di mana ia tidak akan di cekoki dengan kebutuhan perutnya yang belum terpenuhi dan juga mendesak. Ia pun akan lebih mampu mengkonsentrasikan diri

untuk lebih mengenal Allah lebih mendekatkan diri kepada-Nya serta lebih mengenal kehidupan lain yaitu kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal.

Untuk itu Islam memandang penting untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan cara mengentaskan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi. Islam memiliki dua pandangan terkait dengan pemberantasan kemiskinan yaitu.

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pengangguran. Dimana hal ini dapat dilihat dalam dua hal sebagai berikut;

- a. Pengangguran karena keterpaksaan atau disebut dengan pengangguran *Jabariyah*. Pengangguran *Jabariyah* adalah pengangguran yang terjadi karena terpaksa atau suatu keterpaksaan. Suatu pengangguran di mana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan diharuskan menerimanya. Pengangguran semacam ini bagaikan suatu musibah yang tidak kuasa menolaknya sebagaimana musibah-musibah lainnya. Pengangguran semacam ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun, yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil yaitu sebagai modal dalam mencari penghidupan. Pada umumnya pengangguran *Jabariyah* merupakan

tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah namun hal ini lebih diberikan kepada orang tua dan walinya yang tidak memperdulikan pengajaran apapun atas dirinya sejak kecil dengan bekal itu memungkinkan untuk dimanfaatkannya pada masa yang akan datang. Untuk itu terkait dengan hal ini Islam memandang bahwa zakat adalah sebagai instrumen utama untuk memberantas kemiskinan sehingga peranan zakat bukanlah sekedar memberikan beberapa uang atau berupa liter beras yang cukup untuk menghidupi seorang penerima zakat dalam beberapa hari atau beberapa minggu setelah itu ia akan kembali kepada kondisi semula dan mengulurkan tangannya menerima bantuan zakat. Sebenarnya peran zakat itu terletak pada bagaimana seseorang penerima mampu menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya, oleh karena itu setiap orang yang memiliki satu keterampilan khusus, seperti seseorang yang mempunyai latar belakang sebagai pedagang maka ia berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat yang ada agar ia mampu menjalankan

profesinya, yang pada akhirnya ia mampu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya bahkan mencukupi kebutuhan keluarganya dengan teratur dan untuk selamanya. Sedangkan bagi seseorang yang lemah dan tidak mampu untuk menjalankan keterampilan profesi ataupun bekerja untuk mencari nafkah bagi kehidupannya, maka Islam telah menetapkan suatu hukum yang khusus. Dalam hal ini Imam An Nawawi menjelaskan tentang kadar dan ukuran zakat yang disalurkan kepada fakir miskin dari fikih Mazhab Syafi'i adalah apabila seseorang terbiasa dalam melakukan suatu keterampilan tertentu maka ia diberikan zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar dapat menunjang keterampilannya tersebut, ataupun untuk membeli alat-alatnya baik dalam hal harga murah maupun mahal. Dengan ukuran tersebut ia mampu mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya, karena itu ukuran ini berbeda dari setiap profesi, keterampilan, daerah, zaman dan juga orang yang menerimanya.

b. Pengangguran Khiyariah atau seseorang yang memilih untuk menganggur atau menjadikan menganggur sebagai pilihan. Ia pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja namun memilih untuk berpangku tangan dan bermalasan sehingga menjadi beban bagi orang lain. Ia banyak meminta dan tidak pernah memberi mengambil banyak keuntungan dari masyarakat bahkan tidak pernah menjadi satu keuntungan bagi mereka ia memilih hancur dengan potensi yang dimiliki dibanding untuk mempergunakannya dengan baik, dia tidak pernah sedikitpun mengusahakan untuk pekerjaan dan mempunyai pribadi yang lemah sehingga menjadi sampah masyarakat. Islam sangat memerangi orang-orang seperti mereka dan tidak meridhoi sedikitpun atas apa yang mereka lakukan walaupun banyak diantara mereka beralasan bahwasanya mereka melakukan hal ini meninggalkan kewajiban untuk mencari nafkah di dunia demi mengkonsentrasikan diri pada akhirat dan beribadah kepada Allah semata.

Sesungguhnya Islam tidak mengenal dunia kerahiban seperti itu. Ali Bin Abi Thalib pernah berkata: “Mencari nafkah dengan cara yang diragukan kehalalannya masih lebih baik dibandingkan bermalas-malasan”. Begitu pula Abdullah bin Zubair berkata “Seburuk-buruknya sesuatu yang ada di dunia ini adalah pengangguran”. Maka untuk itu terkait dengan pengangguran yang disebabkan oleh suatu pilihan ini, bahwa posisi zakat bagi mereka yang bermalas-malasan dalam mencari nafkah padahal mereka memiliki kekuatan dan juga potensi, dalam hadis dikatakan bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun bagian dari uang zakat yang ada. Tidaklah semua fakir miskin berhak mendapatkan bagian dari uang zakat yang ada sebagaimana yang dikira kebanyakan orang selama ini, tidak jarang didapatkan fakir, namun ternyata ia tidak berhak mendapatkan bagian dari uang zakat yang ada, karena ia adalah fakir yang tidak pernah berusaha sedikitpun untuk mencari nafkah kehidupan dirinya, padahal Ia mampu melakukannya. Karena itu ia tidak berhak

untuk mendapatkan kehidupan dari hasil orang lain ataupun dari uang zakat. dalam salah satu Hadis disebutkan bahwa: *“Tidak halal suatu sedekah bila diberikan kepada orang kaya ataupun orang yang mampu bekerja”*(HR Ahmad dan Abu Daud).

2. Kemiskinan yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh satu dari hal sebagai berikut.
  - a. Kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar. Termasuk dalam cakupan lemahnya fisik adalah karena umur yang masih kecil sedang ia tidak mempunyai keluarga seperti yang dialami oleh para anak yatim, ataupun umur yang terlalu tua sebagaimana yang dialami oleh para kakek tua yang sudah lemah. Selain itu bisa jadi karena ia kehilangan salah satu anggota tubuhnya atau panca inderanya ataupun karena ia menderita suatu penyakit yang membuatnya tidak bisa bekerja selayaknya orang

normal. Dan penyebab-penyebab fisik lainnya yang diderita dan ia tidak bisa mengatasi hal tersebut. Orang ditimpa kemiskinan karena hal ini maka ia berhak mendapatkan zakat karena kelemahan fisik yang dideritanya.

- b. Kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan karena ditutupnya pintu-pintu pekerjaan yang halal sesuai dengan keadaan para fakir miskin tersebut. Walaupun mereka telah mengupayakannya dengan sekuat tenaga dan mencarinya dengan gigih, serta giatnya usaha para pemimpin, masyarakat telah memberikan kesempatan pada mereka dalam membuka lowongan pekerjaan, mereka tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang sangat lemah secara hukum, namun tidak ada kekuatannya karena kekuatan tubuh tidak memberikan makanan dan juga tidak menghilangkan kelaparan, selama tidak didapati suatu penghasilan. Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang kisah Dua orang laki-laki yang datang kepada Rasulullah

dan meminta darinya sedekah, Rasulullah menatap keduanya dan lalu menurunkan pedangnya, ia mendapati keduanya orang yang masih kuat lalu Beliau berkata: *“Apabila kalian menginginkan nya aku akan memberikannya, zakat tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang mampu atau kaya dan juga orang-orang yang mampu bekerja seseorang yang mampu bekerja tidak berhak mendapatkan zakat”*. Namun apabila ternyata orang yang mampu bekerja tapi tidak mendapatkan pekerjaan atau ia menemukan pekerjaan, namun bukan pekerjaan yang diperbolehkan atau bisa jadi ia menemukan pekerjaan, namun pekerjaannya itu tidak sesuai dengan kedudukannya di mata masyarakat atau ia mendapatkan pekerjaan namun membebaninya diluar batas kemampuannya maka ia boleh mendapatkan zakat.

- c. Kemiskinan yang ketiga bukan disebabkan karena pengangguran atau karena ia tidak menemukan pekerjaan yang sesuai, tetapi pada kenyataannya ia bekerja dan mendapatkan

penghasilan tetap namun sayangnya penghasilan dan pemasukannya tidak seimbang dengan pengeluaran.

Pendapatannya tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya dan tidak mampu mewujudkan kecukupan sebagaimana yang banyak dialami oleh para buruh, petani dan juga pekerja rendahan atau wiraswasta kecil atau seseorang yang sedikit uangnya tapi mempunyai keluarga yang banyak, di mana ia tidak mampu menanggung semua kehidupan keluarganya tersebut. Mereka yang berada dalam kondisi tersebut boleh mendapatkan zakat. Kondisi mereka adalah keadaan dimana seseorang pun akan menoleh kepadanya dan masyarakat pun tidak akan menggolongkan mereka ke dalam golongan fakir miskin secara resmi.

## METODE

Pemetaan konsep solusi persoalan kemiskinan di Rokan Hulu ini dilakukan dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD), melalui acara Diskusi Publik yang dilakukan di Universitas Pasir Pengaraian, dalam tema “20 tahun Kabupaten Rokan Hulu, Masihkah Kita Miskin?”. Menghadirkan panelis dari

berbagai kalangan, meliputi tokoh masyarakat, akademisi, birokrat, unsur pemerintah daerah, lembaga legislative, lembaga adat melayu, organisasi masyarakat, pemuda dan profesi, dan lain-lain. Selain itu melalui pandangan sikap beberapa komentator di berbagai media setelah kegiatan diskusi dilakukan juga dijadikan sebagai data primer dalam tulisan ini. Dengan total informen yang memberikan pandangan sikap sebanyak 18 orang yang terdiri dari berbagai elemen seperti disebut di atas, selanjutnya sikap dan pandangan mereka di analisis dilakukan dengan pendekatan *thematic analysis* menggunakan sofwer NVivo 12 Plus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan konsep solusi terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Rokan Hulu yang dilakukan dengan pendekatan *thematic analysis* menggunakan sofwer NVivo 12 Plus dapat diperhatikan sebagaimana pada gambar 3 dibawah ini. Berdasarkan gambar 3 tersebut secara umum dapat dikembangkan *mindmap* solusi penanggulangan kemiskina di Rokan Hulu, terdiri dari tiga poin utama, yaitu: 1). Solusi terkait data, 2). Solusi terkait program cepat, dan 3). Solusi kebijakan untuk jangka panjang.

### 1). Solusi terkait data

Data tentang kemiskinan merupakan point penting yang harus terdahulu diperhatikan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah baik itu untuk program cepat atau ataupun untuk pengembangan solusi jangka panjang tidak akan efektif dengan baik jika data kemiskinan tidak dapat ketahui validitas dan keakuratannya. Hal ini

diungkapkan oleh informen sebagai berikut.

*“Kemiskinan hanya salah satu indikator pembangunan diantara banyak indikator lain seperti pengangguran. Namun semoga apa yang kami lakukan ini bisa membuka kesadaran akan pentingnya data dalam proses pembangunan”.*

Selanjutnya, solusi berkaitan dengan pentingnya data ini, dapat pula dilihat dalam 3 hal, yaitu: 1). Data berkaitan dengan pemetaan kantong-kantong kemiskinan, 2). Data berkaitan kehadiran penduduk baru di Rokan Hulu yang belum terdaftar sebagai penduduk Rokan Hulu, dan 3). Data berkaitan dengan validitas penduduk miskin *by name by address*.

Pentingnya data berkaitan dengan pemetaan kantong-kantong kemiskinan yang merupakan bagian solusi dalam program penanggulangan kemiskinan di Rokan Hulu, ini dijelaskan oleh informen dengan pernyataan sebagai berikut.

*“Perlu ada pemetaan kantong2 kemiskinan ada dimana. Bukan hanya pemetaan geografis tapi juga pemetaan jenis kemiskinan, apakah kemiskinan struktural atau kultural”.*

Selanjutnya, kehadiran penduduk baru yang datang ke Rokan Hulu juga perlu pendataan yang jelas, karena banyak dari mereka yang datang sebagai penduduk miskin dan terdata sebagai orang miskin di Rokan Hulu. Ini disampaikan oleh informen dengan pernyataan sebagai berikut.

*“Penduduk yang masuk berkembang dan lahir di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018 12.932/jiwa ini rata-rata ke Rokan Hulu karena memiliki peluang dan tidak jarang yang datang tertarik berkerja di kebun, untuk Provinsi Riau hari ini*

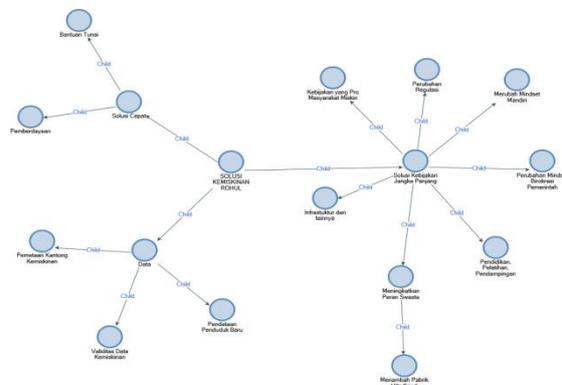
*100.000/penduduk diperkirakan itu tidak melapor ke pemerintah salah satunya di Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Langsung datang ke Rokan Hulu tinggal di kebun, tinggal di ladang mengurus usaha-usaha sehingga tidak terdaftar sebagai penduduk Rokan Hulu”.*

Selain itu, data penduduk miskin di Rokan Hulu yang komplit sampai dengan “nama” dan “alamat” juga merupakan solusi utama dalam program kemiskinan di Rokan Hulu. Tanpa kelengkapan data ini, maka solusi program pemberdayaan dan lain sebagainya tidak akan dilakukan dengan efektif. Ini dijelaskan informen dengan pernyataan sebagai berikut.

*“Selanjutnya saya menduga Pemkab Rohul tidak memiliki data by name by address warganya yang miskin dan/atau yang berada di ambang batas miskin itu”.*

2). Solusi terkait program cepat

Banyak program sebenarnya yang berujung kepada pengurangan kemiskinan, seperti perbaikan infrastruktur dan lain-lain, tetapi hal itu dipadang sebagai suatu solusi yang tidak langsung cepat menyentuh orang-orang miskin, maka solusi program yang cepat tentunya harus dilakukan. Ini dijelaskan informen dengan pernyataan sebagai berikut.



Gambar 3. *Mindmap thematic analysis* solusi penanggulangan kemiskinan di Rokan Hulu

*“Oleh karena itu saya meminta HKR Pekanbaru untuk berunding menentukan langkah-langkah cepat untuk memastikan Pemkab Rohul benar-benar menjadikan masalah kemiskinan ini sebagai masalah darurat di Rohul”.*

Informen lain juga menyebutkan akan pentingnya solusi program bersifat cepat, dengan pernyataan sebagai berikut.

*“Berdasarkan data ada masyarakat kita yang miskin yakni sebesar 10,95%, terhadap mereka yang miskin dibutuhkan kebijakan cepat dan pemerintah harus meningkatkan peranannya, dan harus tertuang dalam RPJMD”*

Apa program yang dipandang mampu cepat dapat menyentuh dan dirasakan langsung oleh penduduk miskin di Rokan Hulu itu?, hal ini dapat dilihat dalam dua hal, yaitu: 1). Program bantuan tunai, dan 2). Program pemberdayaan.

Program bantuan tunai pada dasarnya merupakan program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Rokan Hulu. Diungkapkan oleh informen dengan pernyataan sebagai berikut

*“Jika yang terdaftar sebagai masyarakat Rokan Hulu telah kita melakukan upaya-upaya seperti penyaluran bantuan (raskin), untuk rastra 2017 jumlah yang di BDT PASCA SUMBER TERPADU adalah 17.940 kepala keluarga, dan tahun 2018 di BDT PKH 12.136/KK”.*

Namun demikian, program ini pada dasarnya dipandang sebagai solusi darurat untuk para penduduk miskin yang tidak mampu bekerja dan berusaha. Program ini tidak dapat sebagai suatu pendidikan dan

pemberdayaan para penduduk miskin untuk kedepannya mampu mandiri. Untuk itu program pemberdayaan seharusnya juga harus digalakkan oleh Pemda Rokan Hulu, seperti program Kementerian Social RI sendiri tentang program ekonomi produktif salah satunya ada program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang harus didampingi dan dievaluasi dengan baik oleh Pemda Rokan Hulu. Ini dijelaskan oleh informen sebagai berikut.

*“Sebenarnya berdasarkan program Kementerian Sosial sendiri ada program andalan pemberdayaan seperti KUBE, namun banyak KUBE yang dibantu tetapi tidak ada pendamping dari pemerintah daerah”.*

Selain itu informen lain juga mengungkapkan pentingnya solusi pemberdayaan dengan pernyataan sebagai berikut.

*“Apa peran pemerintah daerah? Kedepan, selain solusi simptomatik yang sudah ada, seperti pemberdayaan, maka yang terpenting juga adalah kebijakan pemerintah harus berpihak pada masyarakat miskin”.*

Sedangkan informen lain juga menyebutkan sebagai mana pernyataan dibawah ini yang memandang bahwa solusi pemberdayaan merupakan hal penting untuk masyarakat miskin di Rokan Hulu

*“Syarat dari perbankan untuk Rokan Hulu yaitu lebih meningkatkan yang namanya ekonomi kreatif”.*

3). Solusi kebijakan untuk jangka panjang

Untuk solusi kemiskinan di Rokan Hulu pada point yang ke-tiga ini, dapat pula dipetakan dalam enam hal solusi, yaitu: 1). Peningkatan dan perbaikan infrastuktur dan lainnya, 2). Kebijakan yang harus

mendukung kepada masyarakat miskin, 3). Meningkatkan peran swasta/perusahaan, 4). Merubah *mindset* kemandirian bagi para keluarga fakir miskin, 5). Adanya pendidikan, pelatihan, pendampingan keluarga miskin, 6). Merubah *mindset* birokrasi pemerintah, 7). Perlu adanya perubahan regulasi untuk kesejahteraan masyarakat baik regulasi pusat maupun daerah.

Solusi kebijakan pemerintah untuk jangka panjang haruslah berpihak kepada kebijakan yang mendukung dalam upaya penanggulangan kemiskinan, ini dijelaskan oleh informen dengan pernyataan sebagai berikut.

*“Solusi pemerintah harus berpihak kepada masyarakat miskin, kebijakan pemerintah haruslah bertujuan yang lebih untuk orang miskin dan apabila kebijakan pemerintah daerah salah maka berdampak pada masyarakat mengakibatkan banyak masyarakat miskin di Rokan Hulu”.*

Selanjutnya, solusi pertama yang sifatnya tidak langsung menyentuh kepada masyarakat miskin, tetapi secara jangka panjang adalah untuk penanggulangan kemiskinan di Rokan Hulu adalah peningkatan dan perbaikan infrastruktur, membuka akses pariwisata, dan lain-lainnya. Ini dijelaskan informen dengan pernyataan sebagai berikut.

*“Dari video yang di tampilkan tadi dimana salah satunya yang menjadi penghambat yang menyebabkan kita miskin salah satunya Infrastruktur penghubung yang mungkin masih terbatas”.*

Informen lain juga menyebutkan bahwa keterisolasian akses juga adalah solusi untuk penanggulangan kemiskinan. Dijelaskan dengan pernyataan sebagai berikut.

*“Dan yang ketiga penyebabnya adalah keterisolasian akses, tentunya pemerintah bangun jalan sesuai kebutuhan, jembatan yang aman, dan lain-lain”.*

Selain itu pernyataan informen berikut juga menunjukkan bukti bahwa perbaikan infrastruktur merupakan bagian penting dalam solusi kemiskinan di Rokan Hulu.

*“Rokan Hulu perlu meningkatkan infrastruktur daerah dan akses ke pariwisata, dan mengatur sirkulasi keuangan di daerah”.*

Solusi kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Rokan Hulu terkait dengan program jangka panjang kedepan dalam penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan yang harus mendukung kepada masyarakat miskin. Beberapa pernyataan informen yang menjelaskan terkait hal ini adalah sebagai berikut.

*“Sejarah Rokan Hulu, 5 tahun pertama, menata ibu kota. Seluruh resources pembiayaan teralokasi kesana semua sehingga masyarakat miskin terabaikan. Maka setelah itu tahun ke-2 berikutnya Pemda harus memprioritaskan masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah daerah harus berperan penuh kepada masyarakat miskin itu sendiri”.*

Sementara itu, pernyataan informen lain yang tidak menyebutkan secara tegas tentang perlunya kebijakan yang mendukung masyarakat miskin, namun disebutkan bahwa kebijakan pemerintah Rokan Hulu saat cenderung membentuk distribusi yang timpang. Disebutkan dengan pernyataan sebagai berikut.

*“Saya sepakat dengan 'tidak diurus serius' itu. Semua orang tahu, Rohul itu kaya SDA dan orang-orangnya pekerja keras. Cuma*

*memang distribusi aset keekonomiannya timpang, dikuasai segelintir orang”.*

Selanjutnya solusi ketiga yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah Rokan Hulu adalah bagaimana upaya melibatkan pihak swasta/perusahaan di Rokan Hulu ikut serta dalam program penanggulangan kemiskinan. Disebutkan oleh informen bahwa swasta sebenarnya harus mendominasi dalam hal kemiskinan ini dari pada pemerintah. Disebutkan dengan pernyataan sebagai berikut.

*“Diluar negeri peran pemerintah sebenarnya hanya mewarnai pembangunan sebesar 20% sisanya yakni 80% ditentukan oleh faktor swasta”.*

Terkait dengan upaya melibatkan pihak swasta ini pemerintah Rokan Hulu juga harus mendorong berkembangnya industri hilir dari perusahaan sawit di Rokan Hulu yang saat ini secara umum masih mendominasi dalam bisnis CPO. Disebutkan informen dengan pernyataan sebagai berikut.

*“Sehingga kami dapat melihat bahwa ketika kita melihat salah satu perusahaan di Siak hasil riset bahwa diluasan pabrik kebun kelapa sawit 13.440 ha ada salah satu perusahaan sinar mas yang ada di Siak ini mereka memiliki jumlah karyawan sebanyak 28 difisi dan memiliki  $\leq 3.660$  karyawan yang ada disana, apabila di kalikan secara merata 3.660 dengan posisi hari ini Rokan Hulu memiliki lahan perkebunan yang dikelola  $\leq 210.000$  lahan perkebunan yang ada di Rokan Hulu ini, maka jumlahnya akan puluhan ribu juga mereka berada bekerja bersama diperusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu”.*

Solusi keempat untuk jangka panjang yang harus dilakukan adalah membentuk paradigma ataupun merubah mindset para

keluarga fakir miskin untuk mampu mandiri dan tidak lagi menjadi masyarakat yang menunggu dan berharap selalu ada bantuan orang lain. Salah satu informen menyebutkan bahwa harus ada keinginan keluarga miskin tersebut mau berubah mandiri terlebih dahulu, jika mereka mau keluar dari jeratan kemiskinan. Disebutkan dengan pernyataan sebagai berikut.

*“Mengatasi kemiskinan itu sebenarnya harus ada niat dulu dari orang yang mau dibantu itu, bagaikan melangkah dengan kaki kanan. Niat kan dalam hati bahwa tidak akan ada orang yang membantu kamu, jadi jangan melangkah kaki kiri artinya jika kamu mengharapkan bantuan pemerintah kamu akan menjadi orang yang gagal. Jangan mengharapkan bantuan pemerintah”.*

Informen lain menyebutkan pula sebagai berikut.

*“Bahwa kita tidak bisa tergantung pada pemerintah, dengan keterbatasan yang dimiliki, bahwa kita harus menimbulkan rasa kemandirian untuk berhasil tanpa bantuan orang lain”.*

Solusi kelima adalah menggalakkan adanya pendidikan, pelatihan dan pendampingan bagi para masyarakat miskin. Pendidikan dapat pula dilihat dari memberikan akses pendidikan yang baik bagi anak-anak keluarga masyarakat miskin, sehingga mata rantai kemiskinan terputus dan tidak dilanjutkan oleh generasi setelahnya. Ini disebutkan informen sebagai berikut.

*“Untuk sekolah yang berasal dari Muhammadiyah yang masyarakat yang berstatus du’afa (masyarakat kurang mampu) biaya sekolah anak-anak mereka digratiskan, ini bertujuan agar masyarakat yang kurang mampu bisa sekolah dengan baik tanpa ada hambatan dari biaya dan*

*juga bisa mengurangi angka kemiskinan di Rokan Hulu kedepan”.*

Penjelasan informen lain bahwa perlu adanya pelatihan dan pendampingan disebutkan sebagai berikut.

*“Nah penyebab pertamanya kemiskinan itu sebenarnya adalah rendahnya Keterampilan (skill) seperti; Hard skill, Soft skill, Extra skill, dan solusinya terkait ini adalah adakan peningkatan Pendidikan Formal, Pelatihan/ Penyuluhan/Pendampingan”.*

Disebutkan pula oleh informen lain sebagai berikut.

*“Bahwa dengan memberikan pelatihan dalam membuka bisnis maka mereka akan mengetahui bagaimana cara mengelola sebuah bisnis dengan baik”.*

Solusi keenam dalam upaya jangka panjang kedepan yang harus dilakukan pemerintah Rokan Hulu adalah perubahan mindset birokrasi pemerintah itu sendiri. Hal dijelaskan oleh beberapa statement informen sebagai berikut.

*“Miris dengan SDM Rohul, padahal 20 tahun adalah waktu lama untuk memperbaiki kondisi SDM. Jadi ketika masyarakat miskin maka bisa jadi penyelenggara (pemda) juga sebenarnya miskin (dalam artian tidak menjalankan fungsinya secara maksimal) karena sistem yang dijalankan selalu berubah-ubah”.*

*“Rokan Hulu termasuk miskin turunan, masyarakat Rokan Hulu tidak akan mandiri apabila pemerintahnya tidak mandiri*

*“Tapi karena sistem pemerintahan selalu berubah, terutama ketika terjadi pergantian pejabat, ini juga yang menyebabkan kemiskinan bertambah. Bukan hanya masyarakat yang miskin tapi juga*

*pemerintah daerah tidak punya kemampuan dalam menyelenggarakan sistem yang baik dan benar”.*

Sedangkan solusi yang keenam adalah perlu adanya regulasi pusat dan daerah yang berupaya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu statement informen sebagai berikut.

*“Banyak sekali rumah tangga petani yg memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha, yang idealnya petani punya 10 Ha. Dan solusi ini adalah perbaikan Regulasi Pemerintah Pusat dan Regulasi Pemerintah Daerah”.*

Selain itu disebutkan juga oleh informen dengan pernyataan sebagai berikut.

*"Saya sepakat dengan 'tidak diurus serius' itu. Semua orang tahu, Rohul itu kaya SDA dan orang-orangnya pekerja keras. Cuma memang distribusi aset keekonomiannya timpang, dikuasai segelintir orang”.*

Ini menunjukkan bahwa regulasi baik pemerintah pusat dan daerah yang belum semuanya mendukung untuk kesejahteraan masyarakat dan lebih banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok swasta.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pemetaan konsep solusi terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Rokan Hulu yang dilakukan dengan pendekatan *thematic analysis*, disimpulkan bahwa secara umum solusi penanggulangan kemiskina di Rokan Hulu terdiri dari tiga poin mindmap, yaitu: 1). Solusi terkait data, 2). Solusi terkait program cepat, dan 3). Solusi kebijakan untuk jangka panjang. Solusi terkait data dapat dilihat dari pemetaan data kantong kemiskinan, pendataan penduduk baru, validitas data kemiskinan berdasarkan “nama” dan “alamat. Solusi program cepat dapat dilakukan dengan memberikan

bantuan tunai dan pemberdayaan ekonomi produktif. Sedangkan solusi terkait dengan program jangka panjang dapat dilakukan dengan peningkatan dan perbaikan infrastruktur dan lainnya, kebijakan yang harus mendukung kepada masyarakat miskin, meningkatkan peran swasta/perusahaan, merubah mindset kemandirian bagi para keluarga fakir miskin, adanya pendidikan, pelatihan, pendampingan keluarga miskin, merubah mindset birokrasi pemerintah, perlu adanya perubahan regulasi untuk kesejahteraan masyarakat baik regulasi pusat maupun daerah. Berdasarkan kesimpulan tersebut pemerintah daerah Rokan Hulu pada dasarnya telah mendapatkan rambu-rambu solusi yang akan dilakukan, selanjutnya diperlukan perumusan langkah teknis yang konkrit dan komprehensif terkait dengan rencana pelaksanaan dari setiap solusi yang ditawarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qardhawi (2005) Spektrum zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan. Gema Insani Press.
- Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI (2004). Panduan umum pengembangan usaha ekonomi produktif fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
- Effendi (2019). Kemiskinan di Rohul. Bahan Presentasi Diskusi Publik Universitas Pasir Pengaraian.
- Hermawati, dkk. (2011). Evaluasi program kelompok usaha bersama (KUBE). B2P3KS PRESS Yogyakarta.
- Pairan (2019). Implementasi kebijakan pengembangan usaha ekonomi produktif dalam pengentasan kemiskinan di desa . Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

- Prasetyo (2019). Metode penghitungan kemiskinan. Bahan Presentasi BPS Kabupaten Rokan Hulu.
- Rahman, dkk. (2014). Evaluasi capaian program kelompok usaha bersama pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengaraian, UPP Press.
- Suradi. (2009). Pemberdayaan masyarakat miskin studi evaluasi penanggulangan kemiskinan lima provinsi. Departemen Sosial RI Badan Pendidikan Dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Susantyo & Nainggolan (2018). Integrasi penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan. Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial Vol XIV, No.26. Hal. 73-84.